MENGAWAL TRANSPARANSI SPMB 2026: ANTARA REGULASI DAN REALITAS DI LAPANGAN

Senin, 11 Mei 2026 - gorontalo

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka menjamin akses pendidikan yang adil, transparan, dan berkualitas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

SPMB tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dilakukan secara daring (online) melalui sistem terintegrasi dan saat ini sudah memasuki tahapan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo kepada sekolah-sekolah, para guru, orang tua, hingga komite sekolah. Diharapkan informasi dan juknis SPMB tahun 2026 akan tersebar dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengakses informasi, melakukan pendaftaran, hingga memantau hasil seleksi secara real-time.

Sama halnya dengan SPMB tahun 2025, ada 4 jalur yang dibuka untuk pendaftaran SPMB 2026, masing-masing jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Pembagian jalur ini dirancang agar proses seleksi tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kondisi keluarga. Namun, berkaca pada tahun sebelumnya, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa idealisme kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan realitas.

Jalur domisili, misalnya, dirancang untuk mendekatkan akses pendidikan kepada lingkungan tempat tinggal peserta didik. Secara konsep, ini adalah langkah progresif untuk menghapus stigma "sekolah favorit" dan mendorong pemerataan kualitas. Namun dalam praktiknya, masih banyak siswa yang berdekatan dengan sekolah namun tidak diterima di sekolah tersebut, dan malahan diterima di sekolah yang agak jauh dari tempat tinggalnya. Selanjutnya, manipulasi data kependudukan, seperti perpindahan Kartu Keluarga secara mendadak, menjadi celah yang sulit ditutup sepenuhnya. Di sisi lain, ketimpangan mutu antar-sekolah masih menjadi faktor pendorong orang tua untuk mencari celah, alih-alih mengikuti sistem secara jujur. Akibatnya, jalur domisili yang seharusnya berbasis keadilan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan.

Sementara itu, jalur afirmasi hadir sebagai wujud keberpihakan negara kepada kelompok kurang mampu. Sayangnya, tantangan terbesar jalur ini terletak pada akurasi data. Ketika basis data kemiskinan belum sepenuhnya mutakhir, maka risiko salah sasaran menjadi tak terhindarkan. Lebih dari itu, adanya praktik penyalahgunaan dokumen memperburuk persepsi publik terhadap jalur ini. Padahal, bagi mereka yang benar-benar berhak, afirmasi adalah satu-satunya pintu harapan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

Jalur prestasi juga tidak luput dari persoalan. Di satu sisi, jalur ini memberikan ruang bagi siswa berprestasi untuk berkembang. Namun di sisi lain, belum adanya standar penilaian yang seragam membuat keadilan menjadi relatif. Sertifikat penghargaan yang beragam dari tingkat lokal hingga nasional seringkali sulit diverifikasi kualitasnya. Belum lagi kesenjangan fasilitas antar-daerah yang menyebabkan tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengukir prestasi. Dalam kondisi ini, jalur prestasi berpotensi hanya menguntungkan mereka yang sejak awal sudah memiliki akses lebih baik.

Adapun jalur mutasi, yang diperuntukkan bagi anak dari orang tua dengan perpindahan tugas, menghadapi tantangan pada aspek validasi dan kuota. Tidak jarang muncul dugaan manipulasi surat tugas demi mengakses sekolah tertentu. Selain itu, keterbatasan daya tampung membuat tidak semua peserta dari jalur ini dapat terakomodasi, meskipun secara administratif memenuhi syarat. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan riil dan keterbatasan sistem.

Dari keempat jalur tersebut, benang merah persoalan sebenarnya terletak pada dua hal utama: integritas dan kesiapan sistem. Regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa pengawasan yang kuat dan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menjunjung kejujuran. Di sisi lain, sistem digital yang digunakan dalam SPMB juga harus mampu menjamin transparansi

dan akurasi data secara real-time, sehingga meminimalisasi potensi kecurangan.

SPMB 2026 sejatinya bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan cermin dari komitmen kita dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Jika berbagai celah yang ada tidak segera dibenahi, maka kepercayaan publik akan terus tergerus. Sebaliknya, jika pemerintah mampu memperkuat verifikasi data, meningkatkan pemerataan kualitas sekolah, serta membangun budaya jujur dalam masyarakat, maka SPMB dapat menjadi instrumen perubahan yang nyata.

Namun demikian, dengan pengawasan yang baik serta kolaborasi antara pemerintah, Ombudsman sebagai lembaga eksternal, pihak sekolah, dan masyarakat, SPMB tahun 2026 ini diharapkan mampu menjadi sistem yang lebih adil, transparan, dan inklusif, dengan harapan seluruh anak di Gorontalo mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi.

Pada akhirnya, keberhasilan SPMB bukan hanya diukur dari kelancaran pelaksanaannya, tetapi dari seberapa besar sistem ini mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab pendidikan yang adil adalah fondasi utama bagi masa depan bangsa yang lebih baik.

Penulis: Refliyanto Yusuf (Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo)